

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :

Rizqy Salam Lubis

158520003

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :

Rizqy Salam Lubis

158520003

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul KKL : Laporan dan Pengesahan Data

Nama : Rizqy Salam Lubis

NPM : 15.852.0003

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengesahkan

Medan, 08 September 2018

Mahasiswa Pelaksanaan KKL



(Rizqy Salam Lubis)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Drs. Indra Muda, MAP)

Wakil Dekan



(Beby Masitoh Batubara, S.Sos, MAP)

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan sebuah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu darma pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan pada kegiatan praktek Kuliah Kerja Lapangan. Dengan demikian mahasiswa wajib melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama pegawai yang ada di instansi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Di dalam kegiatan KKL ini, mahasiswa juga dapat mengembangkan pola pikir yang kreatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab, dan juga tanggap atas segala permasalahan. Sehingga kegiatan KKL ini dapat dijadikan sebagai bekal mahasiswa, dan merupakan pijakan awal bagi mahasiswa untuk selanjutnya melangkah lebih jauh lagi ke dalam dunia kerja nyata. Pengalaman yang ingin dituangkan disini adalah bagaimana mahasiswa menyiapkan sedini mungkin dengan berbagai pengetahuan serta kemampuan dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang kompeten, baik dari sisi ilmu, kemampuan, dan tingkah laku.

Dalam penyusunan laporan ini, masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat saya harapkan. Dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.

Medan, 08 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman pengasahan	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan KKL	1
B. Tujuan Pelaksanaan KKL	2
C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL	3

BAB II KAJIAN TEORI

A. Partai Politik	4
B. Pengertian Partai Politik Menurut Para Ahli	5
C. Tujuan Partai Politik	5
D. Fungsi Partai Politik	6
E. Sejarah Partai Demokrat	7
F. Visi Partai Demokrat.....	11
G. Misi Partai Demokrat.....	12
H. Tujuan Partai demokrat.....	13
I. Kelebihan Partai Demokrat.....	13
J. Kekurangan Partai Demokrat.....	13

BAB III DEKRIPSI LOKASI KKL

A. Sejarah Singkat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	15
B. Struktur Organisasi	19

BAB IV PEMBAHASAN

A. Jenis Kegiatan KKL	21
B. Kegiatan Selama KKL	36

C. Analisis Pelaksanaan KKL	40
-----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	41
-------------------	----

B. Saran	42
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KKL

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah maka di bentuklah sebuah fraksi untuk menjadi wadah berhimpunan anggota dewan perwakilan daerah provinsi yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di dewan perwakilan rakyat daerah

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Medan Area merupakan agenda bagi para mahasiswa/mahasiswi di tingkat semester VI dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja maka Universitas Medan Area sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas mahasiswanya. Khususnya Fakultas ISIPOL dengan Jurusan Administrasi Publik sangat mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya melalui KKL atau magang yaitu sebagai wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktek selain itu magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekkan teori yang telah diperoleh mahasiswa juga bertambah pengetahuan khususnya dalam

menyelenggarakan tugas suatu instansi/ pemerintahan yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik.

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas dari pegawai instansi pemerintah, dari situ mahasiswa akan mengetahui secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya sehingga nantinya mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi, tidak dalam hal keilmuan tetapi juga dalam hal kemampuan (*skill*).

Dalam kegiatan magang kali ini penulis memilih lokasi di DPRD Sumatera Utara, karena ingin mengetahui bagaimana kinerja para dewan dan hal apa sajakah yang dilakukan keseharian mereka dalam menangani problem-problem di masyarakat. Karena DPRD merupakan sumber inspirasi dari masyarakat yang memiliki banyak sekali problem sebagai mana yang kita ketahui sekarang. Penulis juga ingin mengetahui apa peran fraksi partai dalam hal berpolitik untuk memiliki kader-kader atau calon-calon pemimpin yang mencapai keefektifan dan dapat produktivitas kerja.

B. TUJUAN PELAKSANAAN KKL

1. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus media adaptasi/pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Mengetahui dan mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia kerja, dan kemudian berusaha mencari penyelesaiannya berdasarkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan.
3. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang Administrasi Publik yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan di dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan serta keterampilan praktis dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana Ilmu Administrasi Publik.
5. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan berbagai instansi, lembaga pemerintahan dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan dalam industri dunia kerja dan sosial masyarakatnya.

C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI KKL

Penulis memilih lokasi di kantor DPRD Sumatera Utara di karenakan ingin mengetahui bagaimana sidang paripurna istimewa dilaksanakan, kinerja para Aparatur Sipil Negara, Honorer dan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya selama menjabat sebagai wakil rakyat dan bagaimana produktivitas kerja kedisiplinan dan efektifitas mereka dalam bekerja.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PARTAI POLITIK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tenang. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung. Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan

mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyanggah political development sebagai suprastruktur politik.

B. Pengertian Partai Politik Menurut Para Ahli

- Menurut **Sigmund Neumann** partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- Menurut **R.H. Soltou** partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- Menurut **Carl J. Friedrich** partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

C. Tujuan Partai Politik

Tujuan umum partai politik adalah :

- ✓ Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- ✓ Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ✓ Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- ✓ Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah :

- Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Fungsi Partai Politik

Dan partai politik juga, berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama.

- 1) Partai sebagai sarana Pengatur Konflik dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya.

- 2) Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.
- 3) Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, dimana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya partai politik ini masyarakat Indonesia semakin mengenal pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat.
- 4) Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

E. Sejarah Partai Demokrat

➤ Pembentukan Dan Berdirinya Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang

Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkam pun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai

Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang

selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

➤ **Pengesahan Partai Demokrat**

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor

M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

F. Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar

ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

G. Misi Partai Demokrat

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

H. Tujuan Partai Demokrat

1. Partai Demokrat memiliki tujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai Demokrat bertekad untuk melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme; dan meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman dan tertib.

I. Kelebihan Partai Demokrat

1. Sosok Sosilo Bambang Yudhoyono menjadi figur yang memikat hati rakyat.
2. Partai Demokrat adalah Partai Penyeimbang.
3. Salah satu partai penguasa di Indonesia.
4. menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dalam program pro rakyat (kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya).
5. Partai yang teguh dalam pemberantasan korupsi.

J. Kekurangan Partai Demokrat

1. Banyak anggota partai demokrat yang terjangkau kasus korupsi.

2. Kurang sinergi antar anggota internal partai demokrat.
3. Tidak memiliki kader-kader partai yang dapat memikat hati rakyat.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. SEJARAH SINGKAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.19 Tahun 1973 tanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2/MGS yang isinya sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1945. Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub provinsi, yaitu :

- Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub provinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga provinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 provinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No.10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Provinsi, yaitu :

- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Sumatera Tengah
- Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota-anggotanya berasal dari masing-masing sub provinsi terdahulu. Dengan Undang-Undang No 24/1956 dibentuklah Provinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Provinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 10/1974 dan Undang-Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.42/1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas-tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

➤ **Visi DPRD Provinsi Sumatera Utara**

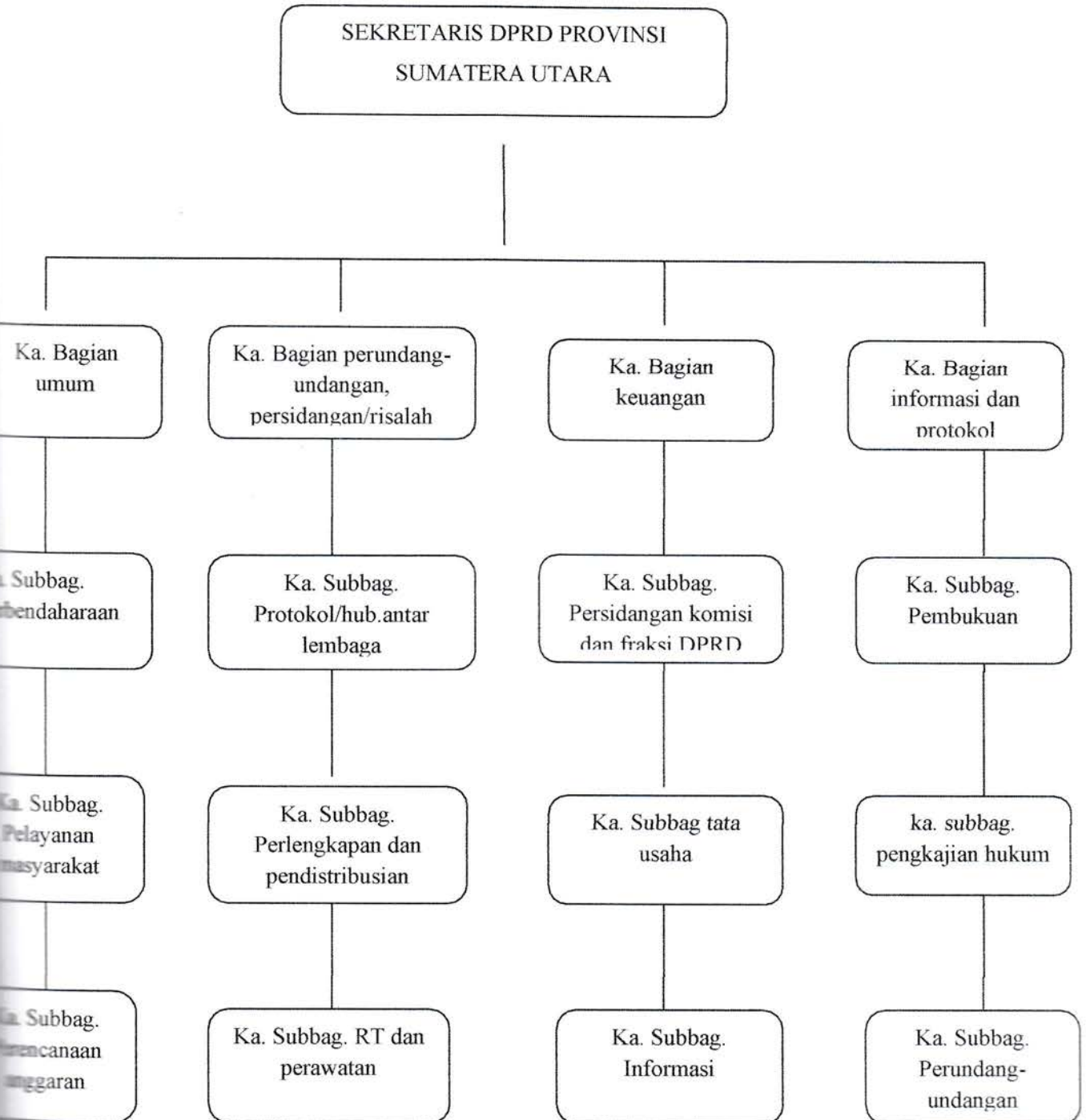
Sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD untuk masa bakti tahun 2014 sampai 2019 mempunyai Visi : “Terwujudnya kehidupan masyarakat dan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, aspiratif, transparan dan akuntabel”.

➤ **Misi DPRD Provinsi Sumatera Utara**

1. Pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat.
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengembangan berbagai Perda dan menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta ketertiban masyarakat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA AGUSTUS 2018



✓ **Tugas pokok dan Fungsi pada Subbagian Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara**

- Merupakan wadah untuk menjalankan asas musyawarah mufakat di parlemen.
- Wadah bagi anggota partai politik untuk menyamakan pendapat dari berbagai aspirasi sesuai dengan prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam konstitusi yaitu asas musyawarah mufakat.
- Berfungsi sebagai tempat pemberdayaan partai politik.
- Wadah untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewenangan anggota yang ada di DPRD guna untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang disalurkan melalui partai politik.
- Berguna untuk mengendalikan kedaulatan rakyat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. JENIS KEGIATAN KKL

1. Administrasi Umum

Manusia sebagai makhluk sosial, sudah menjadi keharusan baginya untuk berkelompok dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan kelompok. Dalam organisasi pada umumnya, dengan semakin kompleknya pekerjaan dan kegiatan, untuk itu dituntut penyempurnaan organisasi agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah administrasi organisasi yang menjadi salah satu elemen penting. Baik tidaknya organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh seluruh bagian dari organisasi tersebut, selain kegiatan operasionalnya. Administrasi diibaratkan darah dalam manusia, bila kegiatannya berhenti maka berhenti pulalah aktifitas organisasi tersebut, bila salurannya tidak lancar maka tersendat-sendatlah jalannya organisasi.

Administrasi umum adalah semua pekerjaan, kegiatan dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah bersifat non operasional dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan.

2. Peranan dan Ciri Administrasi Umum

a. Peranan administrasi umum

1. Mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Menyediakan keterangan bagi pejabat atau pimpinan organisasi guna pengambilan keputusan.
3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan karena berkecimpung dalam penanganan dokumen yang merupakan sumber informasi.

b. Ciri administrasi umum

1. Bersifat dukungan guna memudahkan pekerjaan lain agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Memasuki seluruh bagian organisasi, diperlukan dimana-mana dan dilaksanakan di seluruh organisasi.
3. Dilaksanakan oleh semua anggota dalam organisasi tanpa memandang tugas pokok anggota yang bersangkutan.
4. Memerlukan ketelitian dan kecermatan.

3. Asas-asas Penyelenggaraan Administrasi Umum

a. Asas tanggung jawab

Semua penyelenggaraan administrasi umum harus menunjukkan siapa yang bertanggung jawab.

b. Asas keamanan

Semua tulisan dinas mempunyai tingkat keamanan tertentu.

c. Asas saluran komunikasi

- e. Pendelegasian wewenang tertentu Wewenang pembuatan dan penandatanganan ada pada pimpinan tertinggi organisasi.

2. Instruksi

Intruksi adalah suatu bentuk tulisan yang memuat petunjuk/arahan pelaksanaan suatu kebijaksanaan pokok yang tertuang dalam keputusan tertentu. Wewenang pembuatan dan penandatanganan ada pada pimpinan tertinggi organisasi.

3. Perintah Harian

Perintah Harian adalah suatu bentuk tulisan dinas yang dikeluarkan untuk memperingati suatu peristiwa penting, memuat suatu kebijaksanaan pokok, pesan-pesan pribadi, serta pernyataan kehendak pimpinan yang harus ditaati. Perintah harian tidak memerlukan nomor surat dan tembusan. Wewenang pembuatan dan penandatanganan ada pada pimpinan tertinggi organisasi

4. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Muklak adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat petunjuk-petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk pengaturan urutan-urutan pelaksanaannya, berdasarkan suatu kebijaksanaan pelaksanaan. Isi dari Juklak harus sistematis dan dengan jelas menunjukkan urutan-urutan tindakan pengorganisasian, koordinasi, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan, materi Juklak disusun dalam urutan-urutan pasal-pasal. Wewenang pembuatan dan penandatanganan ada pada pimpinan tertinggi organisasi atau kepanitiaan.

5. Surat Perintah/Surat Tugas (Sprin/Sgas)

Sprin/Sgas adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang/sekelompok personil dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi. Wewenang pembuatan dan penandatanganan ada pada pimpinan tertinggi organisasi atau kepanitiaan.

B. Jenis Tulisan Dinas yang bersifat Naskah

1. Laporan

Laporan adalah suatu bentuk tulisan dinas yang membuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu kejadian secara kronologis.

Laporan dibuat oleh setiap pejabat yang telah diserahi tugas jabatan, baik rutin maupun khusus, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan kedinasan.

2. Surat

Surat adalah bentuk tulisan dinas yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya guna menyampaikan pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan kepada pejabat lain diluar organisasi sendiri. Surat dibuat oleh pimpinan/ pejabat organisasi sesuai dengan lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya.

✓ Nota Dinas

Nota Dinas adalah suatu bentuk tulisan dinas yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya guna menyampaikan pemberitahuan pernyataan ataupun permintaan kepada pejabat lain di dalam lingkup organisasi sendiri. Nota Dinas hanya berlaku di dalam lingkungan organisasi sendiri.

✓ Surat Edaran

Surat edaran adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat pemberitahuan tentang cara yang berlaku atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan pelaksanaan. Surat dikeluarkan oleh pimpinan/ pejabat organisasi sesuai dengan lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya.

✓ Telegram

Surat telegram adalah surat yang dibuat dengan gaya telegram dan sifatnya biasanya mendesak. Surat dikeluarkan oleh pimpinan/ pejabat organisasi sesuai dengan lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya.

✓ Pengumuman

Pengumuman adalah suatu bentuk tulisan dinas yang memuat tentang pemberitahuan sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan/pejabat organisasi dan ditujukan kepada seluruh anggota atau masyarakat sekitar organisasi.

1. Surat Pengantar

Surat Pengantar adalah suatu bentuk tulisan dinas yang digunakan untuk mengantarkan/menyampaikan tulisan dinas lainnya. Biasanya dibuat oleh kesekretariatan atau pejabat organisasi yang ditunjuk.

2. Naskah Dinas Lainnya

Naskah dinas lain adalah tulisan dinas yang tidak termasuk ke dalam salah satu bentuk tulisan dinas yang telah diuraikan di atas, namun kegunaannya sangat penting dalam memperlancar kegiatan organisasi.

- a. Buku Tamu
- b. Buku Piket
- c. Buku Ekspedisi
- d. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar
- e. Buku Kerja
- f. Buku Inventaris
- g. Buku Prestasi Kegiatan
- h. Buku Kas
- i. Buku Peminjaman Barang
- j. Buku Rekapitulasi
- k. Buku Riwayat Hidup
- l. Buku Her Regristasi Anggota

3. Susunan/Format Surat Dinas

- a. Kepala Surat

Kepala surat lazim disebut kop surat. Di dalamnya terdapat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Nama instansi
- (2) Alamat instansi
- (3) Nomor telepon dan faksimil
- (4) Nomor Kotak pos
- (5) Nomor kode pos
- (6) Alamat pos-el (e-mail) dan alamat (web site, kalau ada)
- (7) Lambang atau logo instansi

Kepala surat semacam ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat mengenai nama, alamat, nomor telepon, faksimil, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi pengirim surat.

b. Isi Surat

Pemakaian alinea/paragraf harus diperhatikan, ini sering dilupakan. Tidak setiap kalimat harus dimulai dengan alinea/baris baru; sebaiknya tiap alinea memuat satu hal supaya penerima surat dengan mudah menangkap isi surat. Harus pula dijaga agar alinea-alinea itu tidak menjadi terlalu panjang. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Penyusunan Kalimat

Kalimat yang digunakan dalam surat dinas hendaknya berupa kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, singkat, dan enak dibaca. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah kalimat yang tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku. Kalimat itu sekurang kurangnya memiliki subjek dan predikat.

Selanjutnya, kalimat yang digunakan adalah kalimat yang tidak bertele-tele atau tidak berbelit-belit. Namun, tidak berarti bahwa unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah kalimat itu boleh dihilangkan. Kemudian, kalimat yang enak dibaca adalah yang sopan dan simpatik, tidak bernada menghina atau meremehkan pembaca.

2. Penyusunan Paragraf

Paragraf adalah sekelompok pernyataan yang berkaitan satu sama lain yang merupakan satu kesatuan. Fungsi paragraf untuk mempermudah pemahaman penerima, memisahkan atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis. Gagasan Anda sebagai penulis yang dituangkan dalam surat hendaknya ditata dan diatur sedemikian rupa dalam paragraf-paragraf sehingga gagasan itu mudah dipahami oleh penerima surat. Setiap gagasan disusun dalam satu paragraf yang utuh, yakni paragraf yang memenuhi syarat adanya kesatuan dan kepaduan. Dengan kata lain, gagasan yang sama tidak dituangkan dalam beberapa paragraf. Sebaliknya, beberapa gagasan yang berbeda tidak dituangkan dalam sebuah paragraf yang sama. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu betul-betul hanya berbicara satu masalah. Selanjutnya, paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika kalimat-kalimat yang Anda susun saling berhubungan, dan saling berkaitan. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf akan saling berhubungan dan akan saling berkaitan jika diikat dengan pengait paragraf, yang berupa ungkapan penghubung

antarkalimat, seperti selanjutnya, selain itu, sebaliknya, namun, dan oleh sebab itu, diikat dengan kata ganti, seperti itu, ini, nya, dan tersebut, atau diikat dengan pengulangan kata yang dipentingkan.

3. Pilihan Kata

Surat-surat yang resmi perlu dipilih kata-kata yang memenuhi syarat baik dan baku, lazim, dan cermat. Di samping itu, pemakaian ungkapan idiomik, ungkapan penghubung, atau ungkapan yang bersinonim harus dituliskan dengan benar.

4. Kata yang Baik dan Baku

Penggunaan kata-kata dialek yang belum diakui kebakumannya tidak dibenarkan. Penggunaan kata-kata gimana, ngapain, entar, kasih, bikin, betulin, kagak dan cuman termasuk tidak baik. Padanan kata-kata tersebut yang dianggap baku adalah bagaimana, mengapa, nanti, beri, membuat, memperbaiki, tidak, dan hanya.

✓ Kata yang Lazim

Surat resmi hendaklah dipilih kata-kata yang lazim dalam masyarakat, yaitu kata-kata yang sudah dikenal. Hindari perasaan ingin memperlihatkan keintelektualan atau kesarjanaan Anda dengan menggunakan kata atau istilah asing. Sedapat-dapatnya menggunakan

istilah bahasa Indonesia. Gunakan kata masukan bukan input, peringkat bukan ranking, pantau bukan monitor.

✓ Kata yang Cermat

Penggunaan sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda hendaknya tepat pula sesuai dengan kedudukan orang yang dikirim surat tersebut, apakah penerima surat itu lebih tinggi pangkat dan kedudukannya, ataukah penerima surat itu sederajat kedudukannya dengan pengirim surat.

✓ Ungkapan Idiomatik

Unsur-unsur dalam ungkapan idiomatik sudah tetap dan senyawa. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut tidak boleh ditambahi, dikurangi, atau dipertukarkan. Yang termasuk ungkapan idiomatik itu, antara lain:

- Sesuai dengan
- Bertemu dengan
- Berhubung dengan
- Sehubungan dengan
- Bertalian dengan

✓ Ungkapan Penghubung Kata-kata yang Bermiripan

Ungkapan penghubung dalam bahasa Indonesia ada dua, yaitu ungkapan penghubung intrakalimat dan ungkapan penghubung antarkalimat. Ungkapan penghubung intrakalimat berfungsi menghubungkan unsur-unsur dalam suatu kalimat.

✓ Ungkapan yang Bersinonim

Ungkapan-ungkapan bersinonim berikut tidak digunakan sekaligus karena penggunaan dua kata yang berarti sama merupakan penulisan mubazir. Penulis surat dinas harus menentukan salah satu di antaranya.

Contoh:

- Sejak dan dari (tidak digunakan dalam satu kalimat)
- Adalah dan merupakan (tidak digunakan sekaligus)
- Seperti dan lain sebagainya (tidak digunakan sekaligus)
- Agar dan supaya (tidak digunakan sekaligus)

✓ Kata-kata yang Bermiripan

Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata bermiripan, baik dari segi bentuk maupun dari segi makna. Bahkan, dari segi makna dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut bersinonim. Yang termasuk kata-kata yang bermiripan, antara lain, suatu dan sesuatu, masingmasing dan tiap-tiap, jam dan pukul, serta dari dan daripada.

c. Tajuk tanda tangan

1. Tajuk tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah kalimat terakhir.
2. Tajuk tanda tangan sejauh mungkin dibuat dalam satu baris kecuali apabila tulisan dinas ditandatangani atas nama pejabat lain.
3. Tajuk tanda tangan terdiri dari nama jabatan (Panglima, Komandan, Kepala, Direktur, Asisten dan lain sebagainya) diikuti dengan nama badan, nama dan pangkat yang bersangkutan.

4. Nama jabatan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali dalam telegram dan pada kertas formulir kecil.
5. Nama jabatan pada baris kedua dan ketiga (setelah A.n dan U.b) boleh disingkat.
6. Baris terpanjang dalam tajuk tanda tangan adalah 41 ketukan.
7. Dengan memperhatikan ketentuan no. 6, maka nama badan dalam tajuk tanda tangan dapat disingkat.
8. Ruang tanda tangan 3 spasi.
9. - No anggota atau NIM ditulis dengan bilangan asli
- Pemberian garis bawah antara nama dengan No anggota atau NIM
10. Pendelegasian wewenang dimungkinkan apabila Ketua atau Wakil Ketua betul-betul mendadak pergi semua karena tidak berada ditempat, dan telah melimpahkan kepada eselon bawahan (Kepala Departemen).

d. Penomoran Surat

1. Jenis tulisan dinas atau klasifikasi surat
2. Nomor urut
3. Tulisan kode organisasi
4. Bulan dengan angka romawi
5. Tahun

- d. Untuk meyakinkan pihak lain dengan alasan jelas
- e. Agar semua kegiatan yang telah dilakukan dalam tulisan dinas dapat dijadikan bahan untuk berbagai kepentingan administrasi

2. Derajat Surat

Derajat surat yang dimaksud adalah tingkat kecepatan penyampaian suatu tulisan dinas/berita.

- a. Kilat (K)

Surat harus disampaikan pada saat itu juga.

- b. Sangat segera (SS)

Surat harus dikirimkan pada hari itu juga atau pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada hari itu.

- c. Segera (S)

Surat harus disampaikan dalam 24 jam.

- d. Biasa (B)

3 . Klasifikasi Surat

Klasifikasi surat adalah tingkat keamanan isi tulisan dinas/berita.

- a. Sangat Rahasia (SR)

- b. Rahasia (R)

- c. Konfidensial (K)

- d. Biasa (B)

4. Surat Masuk

Penanganan surat masuk adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penerimaan, surat dikelompokkan sesuai dengan derajat surat.
- b. Tahap pencatatan, surat langsung dicatat dalam agenda surat masuk.
- c. Tahap penilaian, surat di arsip atau di disposisi.
- d. Tahap pengolahan/distribusi, Penerima surat menentukan tindakan apa yang diambil setelah menerima surat.
- e. Tahap penyimpanan, surat disimpan sesuai dengan jenisnya.

5. Surat Keluar

- a. Tahap pengolahan, menyiapkan konsep surat dan tanda tangan.
- b. Tahap pengadaan, memperbanyak sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju.
- c. Tahap pengiriman, surat dikirimkan sesuai dengan derajat surat
- d. Tahap penyimpanan, semua surat keluar harus diarsip dengan baik.

B. KEGIATAN SELAMA KKL

- Hari pertama, saya pengenalan kepada Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat serta pegawai dan stuktur Fraksi Partai Demokrat dan diarahkan bagaimana kegiatan sehari-hari.
- Hari ke dua, saya membantu pegawai mencari berita yang berhubungan dengan dewan Fraksi Demokrat di media cetak/koran lalu di kliping, mengarsipkan dan menomori surat masuk dan surat keluar.

- Hari ke tiga, saya mengikuti senam pagi rutin setiap hari jum'at didepan gedung sekretariat DPRDSU. Lalu saya membantu pegawai mencari berita yang berhubungan dengan dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran di kliping, lalu membantu menempelkan nama para dewan ke dalam berkas laporan dan Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
- Hari ke empat, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping lalu mengantar surat ke bagian TU dan SEKWAN.
- Hari ke lima, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke enam, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke tujuh, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke delapan, saya mengikuti senam rutin setiap hari jum'at didepan gedung Sekretariat DPRDSU, membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke sembilan, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan

dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk, mengantar surat ke ruang bagian wakil ketua III DPRD Sumut.

- Hari ke sepuluh, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk, mengantar surat ke ruang bagian keuangan.
- Hari ke sebelas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk, menuliskan berita acara di papan pemberitahuan.
- Hari ke dua belas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke tiga belas, libur Nasional dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73.
- Hari ke empat belas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke lima belas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke enam belas, saya libur nasional dalam rangka memperingati hari besar yaitu Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1439 H.

- Hari ke tujuh belas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk, memfotocopy jadwal ke komisi E.
- Hari ke delapan belas, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk.
- Hari ke sembilan belas, saya IZIN di karenakan mengikuti ujian di kampus.
- Hari ke dua puluh, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk ke dalam dokumen.
- Hari ke dua puluh satu, saya saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk ke dalam dokumen.
- Hari ke dua puluh dua, saya saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk ke dalam dokumen.
- Hari ke dua puluh tiga, saya membantu pegawai mencari berita yang berkaitan dengan Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat di media cetak/koran dan dikliping, mengarsipkan surat-surat masuk ke dalam dokumen, saya meminta penilaian selama KKL dengan pembimbing saya

di lapangan, setelah itu saya dan teman-teman saya berpamitan dan meminta izin kepada pembimbing dilapangan selama sebulan KKL di kantor tersebut.

C. ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Bimbingan mengenai bagaimana mengarsip, menomori surat masuk dan surat keluar oleh ketua dan staf pengelola bagian administrasi umum guna untuk mengetahui apa yang harus saya kerjakan selama sebulan di bagian administrasi umum di Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian saya mengarsipkan setiap surat masuk di buku maupun komputer yang sudah disediakan, dan pada pengerjaan ini saya di bimbing oleh pegawai staf administrasi umum. Hari pertama KKL pada bulan agustus belum terlalu banyak agenda yang saya terima, namun pada minggu kedua sudah mulai banyak agenda tentang surat rapat untuk disampaikan kepada dewan di Fraksi Partai Demokrat dan saya ikut memfasilitasi rapat Paripurna dan Banmus. saya juga melihat pihak staf dan pegawai di Fraksi Partai Demokrat Transparan dalam memberikan data jika di minta, serta memberikan bimbingan dan penjelasan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Saya melakukan kegiatan magang di instansi pemerintahan yaitu DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan KKL dilakukan selama satu bulan, di dalam kegiatan KKL ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini saya mengenal praktik langsung administrasi pada organisasi pemerintahan terutama mengenai surat-menyurat dan rapat Paripurna dan serta pengambilan keputusan dari situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal seperti di bangku perkuliahan.

Dalam kegiatan KKL ini, saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan di instansi DPRD Provinsi Sumatera Utara terutama di Fraksi Partai Demokrat. Selama KKL tidak ditemukan permasalahan yang terjadi, dilihat dari disiplin staf dan pegawai yang datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, terlihat sangat baik. Banyak manfaat yang bisa saya ambil dari KKL ini walaupun hanya selama sebulan, pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat, saya bagikan melalui laporan KKL, yang semoga dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

B. SARAN

Selama pelaksanaan KKL di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih ada juga terdapat pegawai honor yang sering datang terlambat. Bahkan masih sering

terlihat anggota dewan yang tidak pernah datang ke kantor DPRD Provinsi Sumatera utara. dan staf honor di kantor DPRD Provinsi Sumatera utara terlalu banyak.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 5 Teip. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

Email : Humas.dprdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2017 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu :

NO	NAMA	NPM
1.	Rizqy Salam Lubis	158520003
2.	Dinda Emilia	158520005
3.	Junita Dewi Pratama	158520013
4.	Sinta Kismi Hana	158520020
5.	Shintia Devi Simbolon	158520034
6.	Putri Dita Pratama Marpaung	158520040

Telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Agustus 2018

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KABAG UMUM


AHMAD EFFENDI S.Sos. MSP
PEMBINA TK.I
NIP. 19620606 198503 1 011